



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Ekonom: Postur Sementara APBN 2023 Lebih Mengarah ke Pemulihan Ekonomi
Tanggal : Kamis, 15 September 2022
Surat Kabar : Kontan
Halaman : -

Reporter: **Dendi Siswanto** | Editor: **Handoyo** .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai terkuak. Ini setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara APBN 2023.

Adapun dalam postur tersebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah disepakati Rp 993,2 triliun alias masih sama dengan usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebelumnya. Sebagai pembanding, anggaran belanja K/L tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.032,5 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur sementara APBN 2023 yang telah disepakati masih mengarah ke pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari masih besarnya anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Beberapa pos infrastruktur pada masa pandemi ada yang tertunda dan saat ini perlu dikebut pengerjaannya,. belum lagi penambahan proyek strategis yang lain," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (14/9).

Di sisi lain, Yusuf bilang, pembangunan infrastruktur tersebut bisa membawa efek berganda terhadap perekonomian di dalam negeri. Postur sementara APBN 2023 yang mengarah ke pemulihan ekonomi juga diperkuat dengan adanya pos belanja untuk Kementerian Kesehatan yang juga menunjukkan ada langkah persiapan pemerintah dalam menghadapi gelombang pandemi Covid-19 dan potensi wabah yang baru.

Asal tahu saja, lima porsi belanja paling besar terdiri dari, belanja Kementerian Pertahanan Rp 133,4 triliun naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 131,9 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 122,3 triliun turun dari tahun lalu yang sebesar Rp 125,2 triliun.

Selanjutnya, belanja untuk Kepolisian Rp 108,4 triliun naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 107,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 125,6 triliun naik dari belanja tahun lalu yang sebesar Rp 88,5 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 77,9 triliun, turun dari belanja tahun lalu yang sebesar Rp 80,2 triliun.